

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 18.
- Adjie, Habib., Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet 3, Bandung: 2013, Refika Aditama.
- Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akte-Akte Notaris, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017, hlm. 9.
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4). Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hal.104-171.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 7.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) hlm. 89.
- C.S.T.Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 2
- Djoni S. Gezali dan Rachmadi Ueman, 2012, "Hukum Perbankan", hlm. 27, Sinar Grafika, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Mandar Maju, 2022), hlm. 43,56.
- Fuady, Munir, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Utomo, Bandung, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. hal49.
- Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha, Aswaja, Yogyakarta, 2015, hlm. 59.
- George Whitecross Patton, A Text Book of Jurisprudence, Second Edition, Oxford at the Clarendon Press, 1984, hlm 481.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm.33, 124-124

- Habib Ajie. 2010. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama. Surabaya. hal. 19.
- Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, (Jakarta : Harvarindo, 2006), hlm 39.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media,Bandung, 2006, Hlm. 140.
- Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, New York, 1944 hal. 65.
- Hartanti Suhalihandari dan Nisya Rifani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Netaria. Dunia Cendas, Jakarta Timur, hlm. 79, 88.
- Herlien Budiono, Azas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berdasarkan Azas Wigati, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006 , hlm. 107.
- Ismu gunadi,dkk. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm 37.
- J. Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 164.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta,2006), hlm 61.
- Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta ,Alumni AHM-PTHM,1982), hlm. 166
- Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana,(Semarang: CV. Agung,1991), hlm 4.
- M. Marwan & jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cetakan Kesatu, (Surabaya: Reality Pulisher, 2009), hlm. 31.
- M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 34,.305, 341.
- Marko Cahya Sutanto. Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai Model

Pembentukan Hukum Kontrak Jual-Beli Barang Internasional-Indonesia.
Bandung: Penerbit Alumni, 2019.

Marthalena Pohan, Tanggung Gugat Advocat, Dokter, Dan Notaris, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm 32.

Martiman Prodjohamidjojo , Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 31.

Moejatno, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, (Yogyakarta, Pt Raja Grafindo persada,1983), hlm 171.

Munir Fuady, Hukum Kontrak, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 72.

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Pardigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37.

Naskah Akademik Undang-Undang Jabatan Notaris, hlm. 12.

Poernomo, Bambang. 1982. Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,hlm. 182.

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 37.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1974, hlm.57.

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 279.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Ed.1,2,3, Terbitan FH UII Press, Jogyakarta, 2014, hlm. 168-169.

Roslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam HUKUM Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1993), hlm 20-23.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 1984.

- Salim, H .S ,M.S., Hukum Kontrak, Sinar Grafika, 2003, hlm 10.
- Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109-110, 197.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm1-2.
- Suparman Marzuki, 2017. Etika dan Kode etik Profesi hukum. FH UII Press, Yogyakarta, hal. 64.
- Suyud Margono, 2000, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34.
- Tan Thong Kie. 2011. Studi Notariat. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Tuti Rastuti, Seluk Beluk Hukum Perusahaan Dan Hukum Perusahaan, 2015, Bandung: Refika Aditama, hlm. 146.
- Wawan Tunggul Alam, 2004, Memahami Profesi Hukum. Milenia Populer, Yogyakarta, hlm. 102.

Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1 angka 7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 700.
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4432, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham No. 21/2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Jurnal :

Agus Tri Sutanto, Prinsip-Prinsip Umum Pelaksanaan Jabatan Notaris, Universitas Airlangga, 2007.

Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, Penelitian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2013, hlm.1.

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, FH-UGM Press, Jogjakarta, 2008.

Bachtiar Agus Salim, Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , (Bandung : Bina Cipta, 1980), hlm 103-104.

Brilian Pratama Happy Warsitoa, Herman Adriansyah. 2022. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. Jurnal Repertorium Hukum Kenotariatan, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 Mei 2022, Hlm 25.

- Dea Derika. 2020. Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum.18 (2): 173.
- Diah Imaniah, Ngadino, Mujiono Hafidh Prasetyo. 2020. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdana Terhadap Alta yang Dibuatnya. Notarius, 13 (1): 254.
- Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali. 2019. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. Jurnal Hukum & Pembangunan. 49 (1): 180.
- Etheldreda Tikatama Ayutiar, Tanggung Jawab Dan Sanksi Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham, Jurnal vol 2, No. 9, tahun 2020, edisi Maret.
- Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Tesis Master of Law. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2018.
- Henny Saida Flora., (2012) Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. XIV(57), 179-199.
- Habib Adjie, Batasan Pemidanaan Notaris, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22, 2005, hlm 126.
- Iskandar Muda, Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait, February 2021, (siakses pada tanggal 15 Maret 2024).
- Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar. 2020. Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. Jurnal NOTARIUS. 13 (1): 181.
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdana Terhadap Akta yang Dibuatnya, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.32.
- M. Muhtarom. Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. SUHUF, Vol. 26, No.1, Mei 2014.

- Muhammad Iqbal Fauzan. 2020. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, *Acta Diurnal*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 308.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan A.A. Andi Prajitno, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei.
- Putu Vera Purnama Diana. 2017. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Jurnal Acta Comitas*. (1): 160.
- Vina Akfa Dyani Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, No 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 162 – 176.
- Weni M, Maryano, Nurwidiatmo, Tanggung jawab Notaris terhadap PPJB Saham Akibat Peralihan Saham tanpa RUPS, *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Vol.4, No.1, 2018.

Putusan Pengadilan :

Putusan PN Gianyar No.149/Pid.B/2019/PN Gin halaman 72 dan 97.

Putusan PN.Denpasar No.1032/Pdt.G/2018/PN Dps.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.635/PK/Pdt/2020.

Website :

“Mengenal Lebih Jauh tentang Notaris”, February 25, 2019, <https://www.notarislamongan.or.id>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru-lt53247fa3961a8>, (diakses pada , 2 April 2024 jam 13.00).

<http://Jurnal.Umsb.ac.id/artikel-ilmiah-Devisari-santi-10-121-2.Pdf>, Tanggal Akses 20 januari 2024.

<https://redasamudera.id/definisi-hukum-menurut-hans-kelsen/>. Definisi hukum menurut hans kelsen , (diakses pada, 15 Maret 2024, jam 12.00).

Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, 2009,
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140T%2027453Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf>, akses pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 19.38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>, (Diakses pada 12 Maret 2024).

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>, (Diakses pada 09 Maret 2023 pukul 12.11 WIB).